

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Board of Director

#### 2.1.1. Sistem Organisasi Board of Director

*Board of Director* merupakan mekanisme dasar tata kelola perusahaan, baik untuk perusahaan public maupun perusahaan biasa. Sutojo and Aldridge (2005). *Board of Director* diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada para pemegang saham. Pengangkatan *Board of Director* dilakukan dalam rapat umum pemegang saham. Sedangkan pertanggungjawaban atas penerapan strategi bisnis dan kinerja perusahaan oleh *Board of Director* kepada pemegang saham dilakukan dalam rapat umum dan rapat luar biasa pemegang saham.

Menurut OECD (*Organization for Economic Corporation and Development*), terdapat dua sistem yang berkaitan dengan bentuk dewan dalam perusahaan, yaitu:

1. *One tier board* (sistem *Anglo Saxon*)

Sistem ini diterapkan antara lain di Amerika Serikat, Australia, India, Inggris, Singapore dan Hong Kong. Dalam sistem *Anglo Saxon*, *Board of Director* terdiri dari satu kesatuan unit organisasi. OECD menyebut struktur organisasi seperti itu sebagai *unitary board* yang terdiri dari *Chairman* yang mengetuai para *Non-executive Directors* dan para *Executive Directors* yang diketuai oleh CEO. Dalam sistem ini seorang CEO dapat merangkap juga sebagai seorang *Chairman*, menurut Scott Green (2005) *Sarbanes-Oxley and the Board of Directors. Techniques and Best Practices for Corporate Governance*. Kondisi ini disebut dengan istilah Imperial CEO. Dalam *Corporate Governance, the Chartered Secretaries Australia* mengemukakan perbedaan antara *Executive* dan *Non Executive Directors* sebagai berikut:

- a. *Executive Directors*

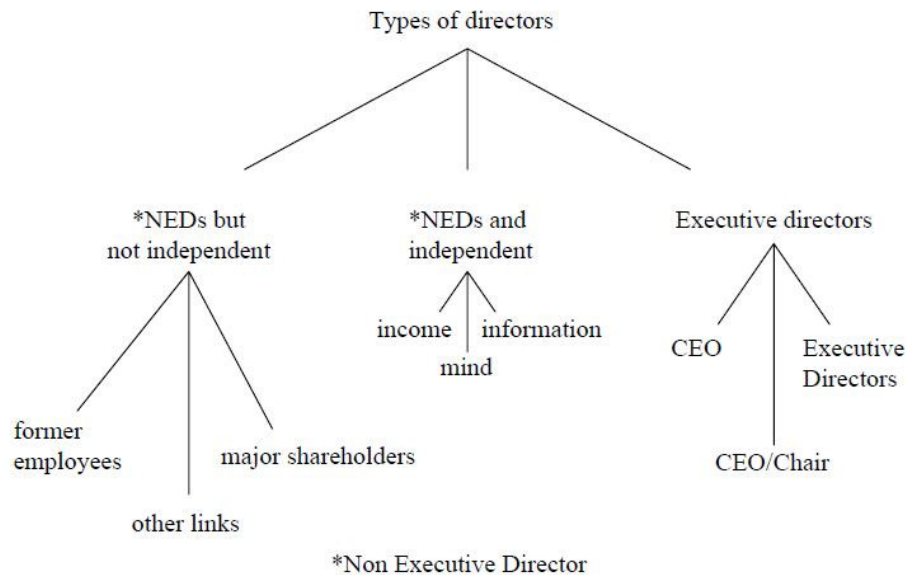
Status para *Executive Directors* adalah karyawan perusahaan, biasanya mereka merupakan seseorang yang berkedudukan sebagai manajer puncak dan dipimpin oleh seorang *Chief Executive Officer*

(CEO). Disamping tanggung jawabnya sebagai pengelola harta, utang dan kegiatan bisnis perusahaan, *Executive Directors* juga dapat mempunyai kedudukan sebagai anggota *Board of Directors*. Di perusahaan-perusahaan skala menengah dan besar biasanya *Chief Executive Officer* dan *Chief Financial Officer* (CFO) diangkat menjadi anggota *Board of Directors*. *Executive Directors* juga disebut sebagai *inside directors*.

b. *Non-Executive Directors*

Para *Non-executive Directors* berstatus bukan karyawan perusahaan. Mereka membawa pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan perusahaan. Mereka bersikap independen dalam hubungannya dengan *Executive Directors*. *Non-executive* (termasuk *Chairman*) juga disebut *outside directors*.

Menurut McCabe dan Nowak (2008), pembagian kategori bagaimana mengidentifikasi kategori komisaris dapat dilihat dengan gambar berikut :



Gambar 2.1 Kategori Komisaris

Sumber : McCabe dan Nowak (2008)

Jumlah anggota *Board of Directors* perusahaan skala besar di Negara penganut system *Anglo Saxon* mayoritas diisi oleh kalangan *Non-executive Directors*. Menurut McCabe dan Nowak (2008), sebuah dewan yang mayoritas terdiri dari *Non-executive Directors* akan memberikan sebuah perlindungan terhadap keseimbangan kekuasaan di dalam hubungan dewan atau manajemen itu sendiri. Scott Green (2005) menyebutkan bahwa dewan-dewan yang efektif mempunyai karakteristik yang salah satunya menyebutkan adanya komposisi *independent director* sebagai mayoritas didalam dewan tersebut.

## 2. *Two tiers board* (sistem *Continental*).

Sistem ini diterapkan diantara lain Indonesia, Belanda, Belgia, Luxemburg, Perancis, Jepang dan Jerman. Dalam sistem *Continental*, *Board of Directors* dipisahkan menjadi dua lapis, OECD menyebut struktur organisasi ini dengan *two-tier board*. Lapis pertama *Board of Directors* adalah *supervisory board* atau Dewan Pembina, sedangkan lapisan kedua adalah *management board* atau manajemen perusahaan. Di Indonesia *supervisory board* disebut Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*), sedangkan *management board* disebut Dewan Direksi (*Board of Directors*). Anggota Dewan komisaris dibagi menjadi dua jenis, komisaris dan komisaris independen. Atas nama para pemegang saham, dewan komisaris melaksanakan fungsi pengarahan dan pengawasan jalannya usaha perusahaan. Dewan Komisaris diketuai *Chairman*, di Indonesia disebut sebagai Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Sesuai dengan undang-undang RI No. 1/1995 tentang perseroan terbatas pasal 97, Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat yang diperlukan. Sedangkan menurut pasal 82 undang-undang tersebut menyatakan direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan.

*Management Board* diketuai *Managing Director* atau *Chief Executive Officer*, dimana di Indonesia disebut sebagai Presiden Direktur atau

Direktur Utama. Tugas direksi adalah melaksanakan fungsi pengelolaan harta utang dan jalannya usaha perusahaan sehari hari, dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris

### **2.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

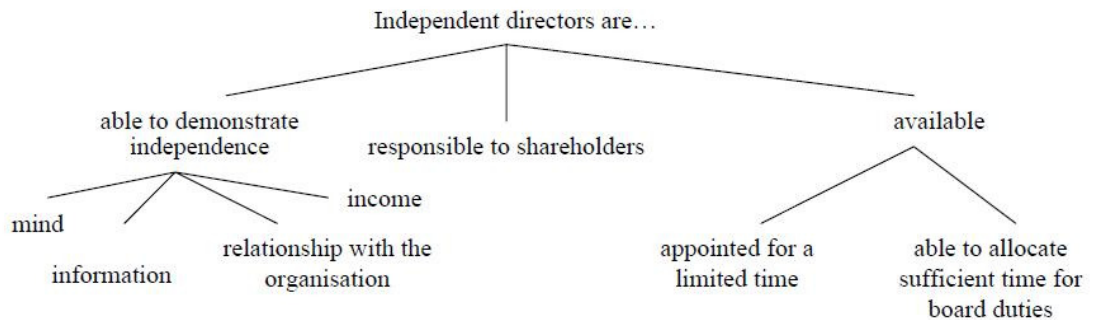
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) dan menurut Alridge and Sutojo (2005) yang menyatakan baik dalam sistem organisasi *two tier board* maupun *unitary board* tanggung jawab dan tugas dewan komisaris adalah untuk:

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas kebijakan pengurusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan memberi nasihat kepada Direksi yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha melalui komite-komite yang dibentuk dewan komisaris
3. Memberikan pendapat dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang disajikan oleh dewan direksi
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan direksi serta menandatangani laporan tersebut (sepanjang dewan komisaris setuju terhadap isi materi laporan tahunan). Hal ini terkait dengan adanya pengaruh dari Sarbanes-Oxley serta menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK No.X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, dimana dewan komisaris dan direksi harus membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan menyetujui dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan keuangan tahunan serta informasi lain yang terkait didalamnya.
5. Anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap

6. Menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak yang terkait dengan perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS yang merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan.
7. Mengawasi pelaksanaan kegiatan bisnis perusahaan agar tetap mematuhi undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku

## 2.2. Karakteristik Komisaris Independen di Indonesia

Karakteristik disini berarti atribut atribut yang melekat pada seorang komisaris independen, seperti jumlah anggota komisaris independen dalam suatu susunan dewan komisaris, bagaimana dia bisa mendemonstrasikan independensinya, latar belakang dari komisaris independen, tingkat kesibukan serta reputasi dari komisaris independen tersebut. Karakteristik ini digambarkan menurut McCabe dan Nowak (2008) dengan gambar berikut :



Gambar 2.2 Karakteristik Komisaris Independen

Sumber : McCabe dan Nowak (2008)

Dalam penelitian ini, variabel yang menjadi variabel independen adalah variabel-variabel yang terkait dengan atribut dalam komisaris independen, yang diprosikan sebagai tingkat independensi Dewan Komisaris (*Board Independency*), tingkat kesibukan komisaris independen (*Independent Commissioner Busyness*), tingkat kehadiran komisaris independen (*Independent Commissioner Diligence*) dan latar belakang komisaris independen (*Independent Commissioner Background*).

### 2.2.1. Tingkat Independensi Dewan Komisaris (*Board Independency*)

Yang dimaksud dengan tingkat independensi adalah sejauh mana dewan komisaris bertindak dan berperilaku untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dari berbagai pihak demi mengurangi potensi konflik kepentingan, terutama kepentingan pemegang saham, karena pemilik sesungguhnya dari perusahaan adalah para pemegang saham. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi. Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* 2006, Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Lebih jauh lagi didefinisikan menurut McCabe dan Nowak (2008), dimana komisaris independen adalah seseorang yang mampu untuk mendemonstrasikan independensinya dalam pikiran, memperoleh informasi, bebas dari hubungan dengan organisasi terkait, dan penghasilan serta tersedia dan menjabat untuk jangka waktu tertentu, mampu untuk mengalokasikan waktu yang memadai dalam menjalankan tugas dewan komisaris serta bertanggungjawab kepada pemegang saham.

Menurut peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 dan peraturan Bursa Efek Indonesia nomor I-A Kep-305/BEJ/07-2004 dimana perusahaan publik yang tercatat dibursa wajib memiliki beberapa anggota dewan komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai komisaris independen yaitu jumlah komisaris independen adalah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota

komisaris untuk bisa menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan dari perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan adalah benar, memadai dan kredibel.

Bandingkan dengan PBI No.8/4/PBI/2006 menyatakan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. PBI tersebut juga mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris independen. Hal ini dikarenakan sektor perbankan dinilai lebih riskan karena menyangkut dana masyarakat dan kepercayaan masyarakat, dimana Bank meminjam dana masyarakat sebagai salah satu cara dalam memperoleh dana untuk kegiatan bisnisnya. Perbankan juga merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap sektor lainnya, dimana akan terjadi sebuah *domino effect* apabila terjadi kemacetan pada sektor perbankan.

Dari perbedaan ketentuan tersebut, antara bank dan non bank dapat dilihat bahwa faktor independensi merupakan atribut terpenting dalam sebuah susunan dewan komisaris. Independensi merupakan kunci fondasi untuk sebuah dewan komisaris dapat berfungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Apabila sebuah susunan dewan komisaris dipenuhi dengan pihak yang memiliki hubungan dengan manajemen atau dengan pendiri perusahaan dengan kepemilikan saham yang signifikan atau bahkan mayoritas, maka akan menjadi sebuah kemungkinan bahwa dewan komisaris hanya sekedar mengikuti dan menyetujui segala keinginan manajemen daripada menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen dan pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan yang merupakan fungsi paling utama dari sebuah dewan komisaris. Selaras dengan hasil penelitian Yeh & Woidtke (2005), dimana dewan yang didominasi oleh anggota yang berafiliasi mempunyai performa yang lebih rendah dari dewan yang didominasi oleh anggota yang tidak terafiliasi. Peranan komisaris independen dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dari dewan komisaris sudah menjadi topik diskusi yang sangat panjang dibicarakan baik dalam literatur akademik (Fama, 1981; Fama and Jensen, 1983; Beasley, 1996).

Menurut Benkraiem (2009), terdapat dua alasan mengapa seorang komisaris independen mampu untuk memenuhi peran mereka dengan efektif. Pertama, komisaris independen seringkali diangkat berdasarkan reputasi mereka. Perkembangan karir mereka sepertinya berhubungan erat dengan reputasi mereka. Kedua, tidak adanya hubungan atasan dan bawahan kepada pihak manajemen perusahaan membuat lebih mudah bagi mereka untuk menentang keputusan manajemen secara terbuka, sehingga keberadaan komisaris independen dapat membatasi *earnings management*. Beberapa penelitian terdahulu terhadap mayoritas sistem *Anglo-Saxon*, menunjukkan bahwa *discretionary accruals* berhubungan negatif dengan komisaris independen. (Peasnell et al., 2000; Klein, 2002; Xie et al., 2003; Benkel et al., 2006)

Komisaris Independen diukur dengan persentase jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris.

### **2.2.2. Tingkat Kesibukan Komisaris Independen (*Independent Commissioner Busyness*)**

Yang dimaksud tingkat kesibukan adalah seberapa banyak jabatan komisaris yang dimiliki oleh seorang komisaris independen dimana hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap perhatian dan fokusnya (*attention and focus*) dalam menjalankan fungsinya. Dalam penelitian Sarkar & Sarkar (2006) dikatakan bahwa terlalu banyak jadwal pertemuan memungkinkan untuk mengurangi kemampuan seorang komisaris independen untuk fokus dalam menjalankan tanggungjawabnya dalam dewan komisaris secara efektif. Inilah yang sering disebut sebagai "*busyness*" *hypothesis* dalam literatur Ferris, Jagannathan, & Pritchard (2003) serta Sarkar & Sarkar (2005). Akan tetapi, menurut literatur lain Fama (1980) dan Fama & Jensen (1983), menyebutkan *multiple directorship* juga memberikan keuntungan, dimana seorang komisaris independen yang menjabat sebagai komisaris independen di berbagai perusahaan lain mempunyai arti bahwa yang bersangkutan merupakan seseorang yang memiliki reputasi dan kualitas sebagai komisaris yang sudah diakui. Reputasi dan kualitas inilah yang pada akhirnya akan memberikan sebuah pengawasan yang lebih baik dalam mengurangi adanya kemungkinan *earnings management*. Jadi

pengaruhnya terhadap *earnings management* akan ditentukan dari *net effect* kelebihan dan kekurangan *multiple directorship* itu sendiri. Dalam beberapa penelitian di Amerika Serikat, Definisi paling konservatif dari *busyness* adalah apabila seorang *independent director* merangkap tiga atau lebih *directorship*

*Independent Commissioner Busyness* diukur dengan *dummy variable* berdasarkan ada tidaknya komisaris independen yang menjabat sebagai komisaris independen di tiga perusahaan berbeda.

### **2.2.3. Tingkat Kerajinan Komisaris Independen (*Independent Commissioner Diligence*)**

Yang dimaksud tingkat kerajinan adalah seberapa tinggi tingkat kehadiran komisaris independen dalam menghadiri rapat dewan, rapat komite maupun rapat lainnya yang menjadi tempat dimana seorang komisaris independen dapat berpartisipasi secara formal. Hal ini terkait erat dengan *independent commissioner busyness*, satu konsekuensi langsung dari *multiple directorship* oleh komisaris independen yang sibuk adalah berkurangnya kemampuannya untuk hadir dalam rapat. Menurut Lipton dan Lorsch (1992), masalah yang paling sering dijumpai bagi seorang komisaris independen adalah kurangnya waktu yang memadai untuk memenuhi tanggungjawab profesional mereka, dimana nantinya akan berdampak negatif terhadap kemampuan mereka dalam mengawasi manajemen demi kepentingan para pemegang saham. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Carcello, Hermanson, Neal, & Riley (2002); Sarkar & Sarkar (2005); Sarkar & Sarkar (2006), dimana prosentase kehadiran komisaris berhubungan negatif dengan kemungkinan dilakukannya *earnings management*. Bila dihubungkan dengan independensi serta melihat penelitian terdahulu yang umumnya dilakukan di negara penganut sistem *Anglo Saxon* dimana *Board of Director* beranggotakan komisaris dan direksi yang melebur menjadi satu kesatuan serta menurut Benkraiem (2009), maka kehadiran komisaris independen yang dinilai lebih memiliki pengaruh dalam mengurangi adanya kemungkinan *earnings management*, dikarenakan dengan tidak adanya afiliasi antara mereka dengan perusahaan maka akan lebih mudah bagi mereka dalam menentang atau

mempertanyakan keputusan manajemen secara terbuka dalam rapat gabungan dewan komisaris dan direksi.

*Independent Commissioner diligence* diukur dengan prosentase kehadiran komisaris independen dalam rapat gabungan dewan komisaris dan direksi.

#### **2.2.4. Latar Belakang Komisaris Independen (*Independent Commissioner Background*)**

Yang dimaksud *background* atau latar belakang adalah apa latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja komisaris independen di masa lampau yang akan memberikan dia sebuah kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tentu untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan tentu pihak yang mengawasi haruslah memiliki terlebih dahulu pengetahuan dan pengalaman di bidang yang diawasi. Bahkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* 2006 dikatakan bahwa salah satu dari komisari independen harus mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan, hal ini menunjukkan pentingnya latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan untuk mengefektifkan fungsi pengawasan yang terkait dengan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan mengurangi adanya kemungkinan terjadinya *earnings management* atau bahkan *financial statement fraud*.

Walaupun demikian tetaplah ada kemungkinan terjadinya *earnings management* lolos dari pengawasan komisaris independen, karena menurut logika umum, lebih susah bagi seseorang untuk membuktikan adanya kecurangan daripada melakukan kecurangan. Dalam sejarah dunia keuangan atau akuntansi juga ditemukan kasus serupa, dimana setelah terungkapnya kecurangan barulah peraturan atau hukuman ditetapkan. Seperti dalam kasus skema *ponzi* atau lebih dikenal dengan *pyramid scheme* dimana setelah itu terbentuklah ketetapan bahwa *pyramid scheme* adalah ilegal, kasus penggelembungan laba Enron yang mengakibatkan munculnya *Sarbanes-Oxley Act* dan diperketatnya *corporate governance*. Oleh karena komisaris terafiliasi masih memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perusahaan walaupun juga memiliki latar belakang

akuntansi atau keuangan yang sama dengan komisaris independen, kemungkinan terjadinya *bias* dalam pengawasan komisaris terafiliasi lebih besar serta memiliki kemungkinan untuk memilih tetap diam apabila mengetahui adanya *earnings management* yang mendukung kepentingannya. Hal ini sangat berbeda dengan seorang komisaris independen dengan latar belakang akuntansi dan keuangan yang tidak memiliki kepentingan suatu apapun sehingga dia bebas dan tidak terbebani dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Latar belakang komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang keuangan dan atau akuntansi dalam susunan dewan komisaris.

### **2.3. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)**

Menurut Chouhene (2010), semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka mekanisme untuk mengurangi adanya *agency conflicts* menjadi semakin penting, melalui diangkatnya komisaris independen ataupun mekanisme tata kelola yang lain, penelitian ini juga membuktikan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dengan jumlah komisaris independen. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini berdasarkan kepada total aset perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan proxy log total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun.

### **2.4. Kualitas Audit (*Audit Quality*)**

Kualitas audit merupakan salah satu dari fungsi *corporate governance* dalam membatasi adanya *earnings management*. Menurut DeAngelo (1981) KAP besar akan lebih termotivasi untuk memberikan jasa audit yang lebih berkualitas. Ada dua alasan yang mendukung analisis ini yaitu: (1) faktor kehilangan reputasi adalah yang terpenting bagi KAP besar apabila ada permasalahan yang

ditimbulkan dari jasa audit dan (2) KAP besar umumnya memiliki aset yang lebih besar sehingga lebih bisa dituntut untuk kerugian dalam hal malpraktik. Kedua alasan ini terbukti kebenarannya dengan adanya kasus Enron terhadap KAP Arthur Andersen pada tahun 2001). Perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh KAP besar juga terjadi penggunaan *discretionary accruals* yang lebih sedikit, penelitian yang mendukung pernyataan tersebut adalah Francis and Krishnan (1999); Kim et al. (2003); Cormier et al. (1998) dan Jeanjean (2001)

Kualitas audit diukur dengan apakah laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP *big four* atau tidak (Price Waterhouse Cooper, Ernst & Young, Deloitte dan KPMG).

## **2.5. Earnings Management**

### **2.5.1. Definisi dari Earnings Management**

*Earnings management* menurut Scott (2003) adalah merupakan cara yang digunakan manager untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis dengan cara memilih kebijakan akuntansi demi mencapai beberapa tujuan spesifik. Teknik dalam melakukan *earnings management* dapat dibedakan menjadi 3 cara, yaitu: (1) pilihan dalam memakai metode akuntansi seperti memilih menggunakan metode depresiasi *straight line* dimana menghasilkan beban depresiasi yang sama setiap tahunnya atau *double declining balance* yang menghasilkan beban depresiasi yang besar diawal sehingga laba akan mengecil dan beban depresiasi yang semakin menyusut pada tahun berikutnya sehingga laba akan membesar atau dalam memilih metode pencatatan persediaan *FIFO* atau *weighted average*. Manajemen dapat memilih metode akuntansi yang lebih dapat mencapai tujuan atau kebutuhan perusahaan saat itu. (2) pilihan dalam menentukan estimasi akuntansi seperti dalam menentukan estimasi akuntansi seperti estimasi piutang tak tertagih, estimasi biaya garansi atau estimasi masa manfaat aset tetap. Dimana estimasi ini nantinya akan mempengaruhi jumlah beban di laporan laba rugi yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah laba di laporan keuangan tahun tersebut. (3) menggeser periode biaya atau pendapatan seperti mempercepat suatu kejadian dari periode akuntansi mendatang ditarik ke periode akuntansi berjalan atau menunda dan mengulur suatu kejadian hingga ke periode akuntansi yang

berikutnya. Kejadian kejadian itu bisa berbentuk seperti biaya iklan dan promosi, biaya penelitian, pengiriman barang baik dari *supplier* maupun pelanggan sampai dalam keputusan pelepasan aset tetap.

*Earnings management* menurut Scott (2003) dapat dilihat dari 2 perspektif yaitu laporan keuangan dan kontrak. Dari perspektif laporan keuangan, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar dari harga saham perusahaan dengan *earning management*. Seperti contoh: manajer ingin membuat kesan akan pendapatan perusahaan yang terus bertumbuh secara mulus tiap periode. Sedangkan dari sebuah perspektif kontrak, *earnings management* dapat digunakan sebagai cara untuk melindungi perusahaan dari konsekuensi kejadian yang tidak diinginkan akibat adanya pelanggaran dalam perjanjian kontrak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *earnings management* merupakan pilihan manajemen dalam menentukan kebijakan akuntansi, menggunakan estimasi akuntansi yang bersifat *judgment* dalam struktur akuntansi untuk merubah laporan keuangan untuk mencapai beberapa tujuan spesifik.

### **2.5.2. Pola *Earnings Management***

Pola *earnings management* menurut Scott (2003) adalah

#### **1. *Taking a Bath***

Ini dapat dilakukan ketika organisasi mengalami tekanan. Jika suatu perusahaan harus melaporkan suatu kerugian maka manajemen merasa sebaiknya melaporkan kerugian yang besar sekaligus. Sebagai konsekuensinya, kerugian yang besar di periode sekarang akan menghapuskan aset yang akan menghasilkan beban di masa mendatang. Dampaknya adalah akan terdapat simpanan pendapatan di masa mendatang yang besar (*future earnings "in the bank"*).

#### **2. *Income Minimization***

Pola ini serupa dengan *taking a bath*, namun tidak terlalu ekstrim. Kebijakan untuk meminimalkan laba, meliputi seperti: metode akuntansi *successful-effort* untuk biaya eksplorasi perusahaan minyak dan gas, penghapusan terhadap aktiva, pembebanan biaya iklan dan promosi serta

pengeluaran untuk riset dan pengembangan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang akan dibayar.

### 3. *Income Maximization*

Manajemen yang melakukan pola *income maximization* dalam penyusunan laporan laba ruginya kemungkinan besar dikarenakan tingkat bonus yang diberikan kepada manajer dihitung berdasarkan tingkat pendapatan perusahaan. Perusahaan yang hampir melanggar perjanjian hutang juga tinggi kemungkinannya dalam menerapkan *income maximization*.

### 4. *Income Smoothing*

Sesuai namanya, pola ini bertujuan agar pergerakan laba antar periode bersifat stabil dan tidak fluktuatif. Bila dikaitkan dengan kompensasi bonus bagi manajer maka manajemen yang bersifat *risk-averse* kemungkinan besar memilih pola ini. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan pergerakan bonus yang cenderung stabil. Motif lain bagi manajer untuk melakukan *income smoothing* adalah ketika melakukan perjanjian hutang jangka panjang. Semakin tidak stabil laba bersihnya, maka semakin besar kemungkinan untuk melanggar perjanjian tersebut, sehingga persyaratan yang diberikan kreditur kemungkinan semakin berat. Motif lainnya adalah untuk melaporkan *net income* demi tujuan pelaporan keuangan pihak eksternal. Hal ini akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba yang berkesinambungan.

## 2.5.3. Motivasi *Earnings Management*

Motivasi dari *Earnings Management* menurut Scott (2003) adalah:

### 1. Motivasi Bonus

Laba sering menjadi indikator penilaian prestasi kinerja manajer perusahaan. Manajer akan lebih terdorong untuk melakukan *earnings management* apabila struktur kompensasi bonusnya terkait erat dengan prosentase tingkat pencapaian laba yang diperoleh perusahaan atau target laba minimal yang ditetapkan perusahaan, umumnya *earnings*

*management* yang terjadi adalah *income maximization* atau *income smoothing*.

## 2. Motivasi Politik

Untuk mengurangi *political cost* dan pengawasan dari pemerintah dimana pemerintah biasanya memberi perhatian khusus kepada perusahaan yang menjadi sorotan publik, seperti misalnya karena memiliki banyak karyawan (terkait dengan serikat buruh) dan menguasai sebagian besar pangsa pasar dalam pemasaran produk industri tertentu (terkait dengan UU mengenai persaingan usaha). Dalam kasus ini, biasanya manajemen melakukan *income minimization* sehingga memungkinkan untuk memperoleh fasilitas atau kemudahan dari pemerintah seperti subsidi atau perlindungan dari pihak pesaing luar negeri dan berkurangnya tuntutan dari serikat buruh.

## 3. Motivasi Pajak

Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh manajemen dan pemilik perusahaan, dimana biasanya pola *earnings management* yang digunakan adalah *income minimization* juga meminta bantuan konsultan pajak dalam upaya meminimalkan beban pajak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode LIFO yang akan memperbesar harga pokok penjualan dan mengakibatkan laba yang kecil (perlu diingat bahwa metode pencatatan LIFO tidak diperbolehkan dalam IFRS).

## 4. Memenuhi harapan laba investor

Ekspektasi laba investor dapat didasarkan pada laba periode yang sama pada tahun lalu, atau ramalan analis saat ini. Perusahaan yang melaporkan laba lebih besar daripada harapan investor akan mendapatkan peningkatan harga saham karena investor akan menilai bahwa semakin besar kemungkinan perusahaan akan mencapai kinerja yang lebih baik di masa depan, sedangkan perusahaan yang gagal memenuhi harapan investor akan mengalami penurunan harga saham.

Manajer memiliki motivasi yang besar untuk memastikan bahwa harapan laba investor tercapai, terutama jika manajer tersebut memiliki *executive stock option* atau kompensasi berdasarkan saham lainnya

#### 5. Motivasi Perjanjian Kontrak Hutang

Dalam kontrak pinjaman jangka panjang biasanya memuat perjanjian syarat tertentu misalnya *debt to equity ratio* perusahaan, apabila perusahaan pada saat itu hampir namun belum mencapai tingkat *debt to equity ratio* yang diinginkan kreditur, akan ada kemungkinan bagi manajer untuk menarik pendapatan periode mendatang ke periode berjalan agar dapat memenuhi syarat dari perjanjian kontrak hutang tersebut.

#### 6. *Initial Public Offering (IPO)*

*Initial Public Offering (IPO)* adalah keadaan dimana saham suatu perusahaan ditawarkan pertama kali kepada publik. Manajer dapat melakukan *earnings management* dalam laporan keuangan agar dapat mempengaruhi pertimbangan aktuaris dalam menetapkan harga per lembar saham lebih tinggi pada saat IPO, sehingga jumlah *proceeds* yang diperoleh dari hasil penjualan saham pada saat IPO dapat meningkat.

### **2.5.4. Pengukuran *Earnings Management***

Pada umumnya perusahaan dapat melakukan *earnings management* dengan 2 pendekatan, yaitu: pertama dengan mengendalikan transaksi akrual dan kedua dengan mengubah kebijakan akuntansi. Pengendalian net income menggunakan pendekatan transaksi akrual lebih sering digunakan karena transaksi akrual memiliki pengaruh terhadap pendapatan dan biaya namun tidak memerlukan adanya penjelasan tentang apa alasan dan mengapa dilakukan hal tersebut di dalam *disclosure* laporan keuangan. Sedangkan mengubah kebijakan akuntansi mengharuskan manajemen untuk menjelaskan dalam *disclosure* pada laporan keuangan mengenai tujuan dan alasan manajemen mengubah kebijakan akuntansi.

Untuk mengilustrasikan bagaimana akrual digunakan untuk mengelola *earnings* dapat dilihat dari rumus Scott (2003) :

$$\text{Net Income} = \text{operating cash flow} + \text{net accruals}$$

Dimana persamaan 1 dipecah menjadi :  $\text{Net Income} = \text{operating cash flow} + \text{net discretionary accruals} + \text{net non-discretionary accruals}$ .

Dari rumus ini terdapat dua konsep akrual yaitu: *discretionary accrual* dan *non discretionary accrual*. *Discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba atau beban yang dapat dikendalikan dan ditentukan oleh manajemen serta merupakan pilihan kebijakan manajemen contohnya adalah dalam pemilihan metode akuntansi seperti metode depresiasi dan metode pencatatan persediaan atau dalam menetapkan estimasi akuntansi terhadap sesuatu seperti biaya garansi dan perkiraan piutang tak tertagih. Sedangkan *non discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen, tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Oleh sebab *discretionary accrual* adalah akrual yang dapat diatur oleh seorang manajer yang dimana akan berakibat dalam pengelolaan laba suatu perusahaan, maka dalam penelitian ini *earnings management* diukur dengan menggunakan *discretionary accruals*. Ada beberapa model yang digunakan untuk mengukur terjadinya *earning management*. Model yang digunakan adalah *Jones Model* (1991). Model ini dipilih karena menurut Sanjaya (2006) menyatakan bahwa *Jones model* (1991) dapat mendeteksi *earnings management* lebih baik dari model lainnya. Hasil pengukuran akrual diskresioner tinggi mengindikasikan manajer melakukan peningkatan laba. Sebaliknya, jika hasil pengukuran akrual diskresioner turun mengindikasikan manajer melakukan penurunan laba. Jika hasil pengukuran bernilai nol maka manajer tidak melakukan manajemen laba.

Secara umum, akrual, yang merupakan produk akuntansi, dapat dianggap memiliki jumlah yang “relatif tetap” dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan aturan akuntansi terkait juga tidak mengalami perubahan. Perubahan akrual yang terjadi, oleh karenanya, dapat dianggap sebagai hal yang tidak normal. Perubahan ini merupakan hasil penggunaan kebijakan manajemen yang berlebihan dan bila pada saat yang sama manajemen juga memiliki insentif atau motif untuk

memanipulasi laba maka perubahan akrual yang terjadi dianggap sebagai bentuk manipulasi laba yang dilakukan manajemen.

Model Jones berfokus pada akrual total sebagai sumber manipulasi. Akrual total digunakan secara menyeluruh. Ini dilakukan dengan harapan bahwa akrual total akan mampu menangkap porsi yang lebih besar dari manipulasi oleh manager daripada porsi yang ditangkap bila menggunakan satu dua akun saja. Namun demikian, tidak semua perubahan akrual berasal dari diskresi manajemen. Ada juga perubahan akrual yang berasal dari perubahan kondisi ekonomik perusahaan itu sendiri. Perubahan penjualan, misalnya, akan berpengaruh pada jumlah akrual terkait. Ini berarti usaha untuk menguji manipulasi laba melalui akrual perlu mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomik perusahaan yang dapat mempengaruhi akrual ketika mengestimasi akrual diskresioner. Jones (1991) berusaha mengontrol pengaruh perubahan kondisi tersebut pada akrual dengan memasukkan variabel perubahan pendapatan dan *gross, property, plant, and equipment* (PPE) ke dalam model yang dibangunnya.

Perubahan pendapatan mempengaruhi perubahan akrual yang berasal dari modal kerja (*working capital*) seperti piutang, sediaan, dan utang. Perubahan pendapatan digunakan sebagai variabel kontrol karena relatif objektif sebagai ukuran operasi perusahaan sebelum manipulasi (akrual) oleh manager. Namun demikian pendapatan tidak sepenuhnya eksogenus atau terlepas dari usaha manipulasi laba dan, dengan demikian, tidak sepenuhnya objektif. Hal ini terjadi bila manager berusaha memanipulasi laba melalui manipulasi pendapatan seperti percepatan pengiriman barang agar perusahaan dapat mengakui pendapatan lebih awal.

Sementara itu, PPE dimasukkan ke dalam model untuk mengontrol porsi akrual total yang terkait dengan biaya depresiasi *nondiskresioner*. Tidak seperti pada pengaruh pendapatan yang dikontrol dengan perubahan pendapatan, PPE dimasukkan dalam jumlahnya di periode tersebut (*gross PPE*) dan bukannya perubahan PPE. Ini terjadi karena biaya depresiasi total, bukannya perubahan biaya depresiasi, yang tercakup dalam ukuran akrual total.

Model Jones kemudian mendefinisikan akrual diskresioner sebagai bagian akrual yang terjadi dan dilaporkan pada periode tersebut di luar bagian akrual yang

- umum terjadi – konstan
- terjadi karena perubahan pendapatan atau penjualan – koefisien perubahan pendapatan
- terjadi karena adanya PPE – koefisien PPE

Adapun langkah-langkah perhitungan untuk model Jones adalah sebagai berikut.

Menghitung besarnya total akrual perusahaan dengan pendekatan *cash flow*, yaitu selisih antara laba sebelum pos luar biasa, diskontinyu operasional dan akumulasi perubahan metode akuntansi perusahaan

- a. Melakukan regresi untuk mendapatkan angka-angka untuk koefisien  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  dengan variabel dependen total akrual dan variabel independen adalah total aktiva tahun sebelumnya (t-1), perubahan pendapatan, total aktiva tetap kotor perusahaan pada tahun ke-t atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

Jones (1991)

$$TA_{j,t} = \alpha_1 + \alpha_2 \Delta REV_{j,t} + \alpha_3 PPE_{j,t}$$

$$TA_{j,t} / A_{j,t-1} = \alpha_1 (1 / A_{j,t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{j,t} / A_{j,t-1}) + \alpha_3 (PPE_{j,t} / A_{j,t-1})$$

Dari persamaan di atas semua variabel dibagi dengan deflator total aktiva awal tahun ( $A_{j,t-1}$ ) untuk mengurangi heteroskedisitas. Penskalaan ini merupakan suatu pendekatan *weighted least squares* (WLS) untuk mengestimasi sebuah persamaan regresi yang memiliki *disturbance term* yang heteroskedastik. WLS mensyaratkan semua variabel, dependen dan independen, untuk dibagi dengan estimasi *variansi disturbance term*. Jones (1991) mengasumsikan aset total tahun sebelumnya yang berasosiasi positif dengan *variansi disturbance term* dan, oleh karenanya, ia menggunakan aset total tahun sebelumnya sebagai penskala.

- b. Setelah mendapatkan nilai untuk koefisien  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  maka dilakukan estimasi besarnya akrual *non* diskresioner selama tahun

peristiwa. Menurut model Jones, akrual *non* diskresioner diestimasi selama tahun peristiwa sebagai berikut.

$$NDA_{j,t} = \alpha_1 (1/A_{j,t-1}) + \alpha_2 (\Delta \text{REV}_{j,t} / A_{j,t-1}) + \alpha_3 (\text{PPE}_{j,t} / A_{j,t-1})$$

**Keterangan :**

$NDA_{j,t}$  = *Non discretionary accruals* perusahaan j pada tahun t

$\Delta \text{REV}_{j,t}$  = Selisih *revenue* dari perusahaan j pada tahun t dengan tahun sebelumnya

$\text{PPE}_{j,t}$  = *Gross property, plant, and equipment* perusahaan j pada tahun t

$A_{j,t-1}$  = Total aktiva perusahaan j pada tahun t-1

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  = Konstanta dan koefisien regresi yang diestimasi

- c. Dari perhitungan persamaan di atas akan diperoleh nilai  $NDA_{j,t}$  yaitu akrual *non* diskresioner pada tahun t. Setelah itu maka akan didapatkan nilai akrual diskresioner ( $DA_{j,t}$ ) dengan mengurangi nilai  $TA_{j,t}$  yaitu total akrual perusahaan pada periode ke-t.

$$DA_{j,t} = TA_{j,t} / A_{j,t-1} - [\alpha_1 (1/A_{j,t-1}) + \alpha_2 (\Delta \text{REV}_{j,t} / A_{j,t-1}) + \alpha_3 (\text{PPE}_{j,t} / A_{j,t-1})] \text{ atau}$$

$$DA_{j,t} = TA_{j,t} / A_{j,t-1} - NDA_{j,t}$$

## 2.6. Hubungan Board Independency dengan Earnings Management

Yang dimaksud dengan tingkat independensi adalah sejauh mana dewan komisaris bertindak dan berperilaku untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dari berbagai pihak demi mengurangi potensi konflik kepentingan, terutama kepentingan pemegang saham, karena pemilik sesungguhnya dari perusahaan adalah para pemegang saham. Menurut peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 dan peraturan Bursa Efek Indonesia nomor I-A Kep-305/BEJ/07-2004 dimana perusahaan publik yang tercatat dibursa wajib memiliki beberapa anggota dewan komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai komisaris independen yaitu jumlah komisaris independen adalah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris untuk bisa menjalankan fungsi pengawasan terhadap

pelaporan keuangan dari perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan adalah benar, memadai dan kredibel.

Bandingkan dengan PBI No.8/4/PBI/2006 yang menyatakan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. PBI tersebut juga mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris independen. Hal ini dikarenakan sektor perbankan dinilai lebih riskan karena menyangkut dana masyarakat dan kepercayaan masyarakat, dimana Bank meminjam dana masyarakat sebagai salah satu cara dalam memperoleh dana untuk kegiatan bisnisnya. Perbankan juga merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap sektor lainnya, dimana akan terjadi sebuah *domino effect* apabila terjadi kemacetan pada sektor perbankan.

Dari perbedaan ketentuan tersebut, antara bank dan non bank dapat dilihat bahwa faktor independensi merupakan atribut terpenting dalam sebuah susunan dewan komisaris. Independensi merupakan kunci fondasi untuk sebuah dewan komisaris dapat berfungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Apabila sebuah susunan dewan komisaris dipenuhi dengan pihak yang memiliki hubungan dengan manajemen atau dengan pendiri perusahaan dengan kepemilikan saham yang signifikan atau bahkan mayoritas, maka akan menjadi sebuah kemungkinan bahwa dewan komisaris hanya sekedar mengikuti dan menyetujui segala keinginan manajemen daripada menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen dan pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan yang merupakan fungsi paling utama dari sebuah dewan komisaris. Selaras dengan hasil penelitian Yeh & Woidtke (2005), dimana dewan yang didominasi oleh anggota yang berafiliasi mempunyai performa yang lebih rendah dari dewan yang didominasi oleh anggota yang tidak terafiliasi. Peranan komisaris independen dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dari dewan komisaris sudah menjadi topik diskusi yang sangat panjang dibicarakan baik dalam literatur akademik (Fama, 1981; Fama and Jensen, 1983; Beasley, 1996).

Menurut Benkraiem (2009), terdapat dua alasan mengapa seorang komisaris independen mampu untuk memenuhi peran mereka dengan efektif. Pertama, komisaris independen seringkali diangkat berdasarkan reputasi mereka. Perkembangan karir mereka sepertinya berhubungan erat dengan reputasi mereka. Kedua, tidak adanya hubungan atasan dan bawahan kepada pihak manajemen perusahaan membuat lebih mudah bagi mereka untuk menentang keputusan manajemen secara terbuka, sehingga keberadaan komisaris independen dapat membatasi *earnings management*. Beberapa penelitian terdahulu terhadap mayoritas sistem *Anglo-Saxon*, menunjukkan bahwa *earnings management* berhubungan negatif dengan komisaris independen. (Peasnell et al., 2000; Klein, 2002; Xie et al., 2003; Benkel et al., 2006)

**H1a : Prosentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *earnings management***

## **2.7. Hubungan *Independent Commissioner Busyness* dengan *Earnings Management***

Yang dimaksud *busyness* atau tingkat kesibukan adalah seberapa banyak jabatan komisaris yang dimiliki oleh seorang komisaris independen dimana hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap perhatian dan fokusnya (*attention and focus*) dalam menjalankan fungsinya. Dalam penelitian Sarkar & Sarkar (2006) dikatakan bahwa terlalu banyak jadwal pertemuan akan mengurangi kemampuan seorang komisaris independen untuk fokus dalam menjalankan tanggungjawabnya dalam dewan komisaris secara efektif. Inilah yang disebut sebagai "*busyness*" *hypothesis* dalam literatur Sarkar & Sarkar (2005) dan Sarkar & Sarkar (2006) yang dilakukan di India yang menggunakan sistem *Anglo-Saxon*. Dalam penelitian Ferris, Jagannathan, & Pritchard (2003) yang dilakukan di Amerika Serikat, yang juga merupakan penganut sistem *Anglo-Saxon*, dikatakan bahwa definisi paling konservatif dari *busyness* adalah apabila seorang *independent director* merangkap tiga atau lebih *directorship*. Hasil penelitian Ferris, Jagannathan, & Pritchard (2003) juga menegaskan bahwa ada hubungan signifikan positif antara *multiple directorship* dengan *earnings management*.

Dari sini penulis percaya dengan hasil penelitian Sarkar & Sarkar (2006) dan Ferris, Jagannathan, & Pritchard (2003) dimana ada kemungkinan yang cukup besar terjadi hubungan positif antara *independent commissioner busyness* dengan *earnings management* di negara bersistem *Continental*, dimana semakin sibuk komisaris independen fokusnya akan semakin berkurang dan melemahkan pengawasan sehingga menimbulkan potensi *earnings management* yang semakin besar.

**H1b : Keberadaan komisaris independen yang menjabat sebagai komisaris independen di minimal tiga perusahaan terbuka berpengaruh positif terhadap *earnings management***

## **2.8. Hubungan *Independent Commissioners Diligence* dengan *Earnings Management***

Yang dimaksud *diligence* atau tingkat kerajinan adalah seberapa tinggi tingkat kehadiran komisaris independen dalam menghadiri rapat dewan, rapat komite maupun rapat lainnya yang menjadi tempat dimana seorang komisaris independen dapat berpartisipasi secara formal. Menurut Lipton and Lorsch (1992), masalah yang paling sering dijumpai bagi seorang komisaris adalah kurangnya waktu yang memadai untuk memenuhi tanggungjawab profesional mereka, dimana nantinya akan berdampak negatif terhadap kemampuan mereka dalam mengawasi manajemen demi kepentingan para pemegang saham. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Carcello, Hermanson, Neal, & Riley (2002); Sarkar & Sarkar (2005); Sarkar & Sarkar (2006), dimana prosentase kehadiran komisaris dalam rapat berhubungan negatif dengan kemungkinan dilakukannya *earnings management*. Lebih jauh lagi menurut Benkraiem (2009), kehadiran komisaris independen dalam rapat dinilai lebih memiliki pengaruh secara psikologis terhadap manajemen daripada komisaris yang terafiliasi dalam proses *monitoringnya*, dikarenakan dengan tidak adanya afiliasi antara komisaris independen dengan perusahaan membuat lebih mudah bagi komisaris independen untuk mempertanyakan secara terbuka alasan dan tujuan dari perencanaan keputusan bisnis yang akan dilakukan oleh manajemen.

**H1c : Prosentase kehadiran komisaris independen dalam rapat gabungan dewan komisaris dan direksi berpengaruh negatif terhadap *earnings management***

## **2.9. Hubungan *Independent Commissioner Background* dengan *Earning Management***

Yang dimaksud *background* atau latar belakang adalah apa latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja komisaris independen di masa lampau yang akan memberikan dia sebuah kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan tentu pihak yang mengawasi haruslah memiliki terlebih dahulu pengetahuan dan pengalaman di bidang yang diawasi. Menurut Kusumastuti (2007), komisaris dengan latar belakang akuntansi dan atau keuangan akan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan, dan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya manajemen laba. Hal ini dikarenakan komisaris yang memahami dan mengerti terhadap pelaporan keuangan akan lebih mampu dalam menjaga kualitas informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut.

Bahkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* 2006 dikatakan bahwa salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi dan atau keuangan, hal ini menunjukkan pentingnya latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang akuntansi dan atau keuangan untuk mengefektifkan fungsi pengawasan yang terkait dengan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan mengurangi adanya kemungkinan terjadinya *earnings management* atau bahkan *financial statement fraud*.

Dari literatur-literatur di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen yang memiliki latar belakang pemahaman akuntansi dan atau keuangan dalam susunan dewan komisaris di perusahaan, maka akan semakin kecil kemungkinan bagi manajemen untuk dapat melakukan *earnings management*.

**H1d : Jumlah komisaris independen dengan latar belakang akuntansi dan atau keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap *earnings management*.**

### **2.10. Hubungan *Firm Size* dengan *Earning Management***

Ball and Foster (1982) dalam Koh (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang besar cenderung lebih dipantau oleh pihak luar (seperti analis keuangan dan investasi) sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga bedampak akan mengurangi kesempatan manajer untuk mengambil kebijakan manajemen (*discretionary accruals*).

Albrechth & Richardson (1990) dalam penelitian Utama (2006) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar dinilai kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena laporan keuangan perusahaan besar umumnya *dipublish* kepada umum sehingga dapat oleh pihak luar.

**H1e : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *earnings management*.**

### **2.11. Hubungan *Audit Quality* dengan *Earning Management***

Menurut DeAngelo (1981) KAP besar akan lebih termotivasi untuk memberikan jasa audit yang lebih berkualitas. Ada dua alasan yang mendukung analisis ini yaitu: (1) faktor kehilangan reputasi adalah yang terpenting bagi KAP besar apabila ada permasalahan yang ditimbulkan dari jasa audit dan (2) KAP besar umumnya memiliki aset yang lebih besar sehingga lebih bisa dituntut untuk kerugian dalam hal malpraktik. Kedua alasan ini terbukti kebenarannya dengan adanya kasus Enron terhadap KAP Arthur Andersen pada tahun 2001). Hal ini dibuktikan juga oleh Sanjaya (2008) yang menyimpulkan bahwa auditor berkualitas dan bereputasi yang ditunjukkan oleh kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *big four* (Price Waterhouse Cooper, KPMG, Deloitte, Ernst&Young) mampu mencegah dan mengurangi manajemen laba. Perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh KAP besar juga terjadi penggunaan *discretionary accruals* yang lebih sedikit, penelitian yang mendukung pernyataan tersebut adalah Francis and Krishnan (1999); Kim et al. (2003); Cormier et al. (1998) dan Jeanjean (2001).

**H1f : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *earnings management*.**